



Dana Desa Tahap II ✓ Tunggu Proses Pencairan

Tabanan (Bali Post) -

Angin segar bagi ratusan pemerintah desa di Kabupaten Tabanan, karena dana desa tahap II akan segera cair. Pencairan dana desa yang bersumber dari APBN ini, kini masih dalam pemberkasan untuk pencairannya. "Untuk dana desa yang bersumber dari APBN ini di tahun 2015 mendapatkan Rp 37 miliar, dan itu ditransfer ke rekening desa dalam tiga tahap. Tahap pertama sudah cair bulan April lalu," beber Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Tabanan Gusti Ngurah Supanji, Minggu (23/8) kemarin.

Dalam pengajuan pencairan dana desa, lanjut Ngurah Supanji, masing-masing desa harus melengkapi semua persyaratan. Sejumlah dokumen kelengkapan harus dipenuhi oleh masing-masing desa sebagai syarat pencairan dana desa. Apabila, dalam proses verifikasi dinyatakan lengkap, maka desa tersebut bisa mencairkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tersebut.

Berdasarkan ketentuan, pencairan dana desa untuk tahap I telah dilakukan pada April 2015 lalu sebesar 40 persen, sedangkan tahap II bulan Agustus 2015 sebesar 40 persen, dan tahap III rencananya bulan Oktober 2015 sebesar 20 persen. "Besarnya dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, disesuaikan dengan indeks kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas desa dan tingkat kemiskinan," jelasnya.

Disebutkan, dari 133 desa di Tabanan yang tercatat rata-rata menerima Rp 260-305 juta. Sebelumnya, terkait dana desa sudah dilakukan pertemuan di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah pusat berencana terus menaikkan anggaran yang ada, di mana tahun 2016 dirancang rata-rata Rp 500 juta per desa, dan di tahun 2018 dirancang sebesar Rp 800 juta.

Disinggung terkait permintaan adanya tenaga pendampingan khususnya dalam pengelolaan keuangan tersebut, mantan Kadis DKP Tabanan ini mengatakan, ada tiga jenis pendampingan, yakni tenaga fasilitator di tingkat kabupaten dan kecamatan, ditambah fasilitator teknik.

"Saat ini sudah ada 24 tenaga pendamping di Tabanan yang direkrut langsung oleh Kementerian Desa. Sementara untuk pendamping lokal desa masih dalam proses rekrutmen di BPMPD Provinsi," ungkapnya.

Dari 24 tenaga pendampingan yang dikirim oleh Kementerian Desa tersebut, nantinya akan disebar di masing-masing kecamatan. "Per kecamatan ada dua tenaga penamping dari pusat, ditambah pendamping lokal nantinya," ucapnya.

Sementara, Perbekel Desa Dauh Peken, Komang Sana Yasa, mengakui, tenaga pendampingan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, pihaknya masih merasa was-was dalam pengelolaan keuangan, meski dana desa tahap pertama telah digelontorkan April lalu.

Disebutkan, dana desa tahap I pemanfaatannya telah diarahkan sesuai komposisi yang diberikan kabupaten, yakni untuk kelembagaan dan infrastruktur kantor desa. "Komposisi sejauh ini masih diatur oleh Kabupaten. Jujur saja untuk penggunaan anggaran kami masih bingung dan waswas, jika salah," pungkasnya. (kmb28)

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015

Hal : 14



Honor Panwaslu Rp 2,5 Juta Bawaslu Nilai Menyimpang ✓

Bangli (Bali Post) -

Kisruh yang sempat terjadi antara Panwaslu Bangli dengan Pemkab Bangli terkait kecilnya nilai honor Pilbup nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya dari hasil konsultasi ke Kemendagri belum lama ini diperoleh hasil bahwa Pemkab Bangli diisyaratkan untuk mengacu kembali ke SK Bupati Bangli pertama yang memberikan honor sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yakni Rp 6,5 juta bagi Ketua Panwaslu dan Rp 5,5 juta bagi anggota.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia saat dikonfirmasi Minggu (23/8) kemarin mengatakan, sebagaimana hasil konsultasi tersebut Kemendagri mengisyaratkan Pemkab untuk memberikan honor sesuai SK pertama. Dimana sesuai penerapan SK pertama, honor yang diterima Ketua Panwaslu Rp 6,5 juta dan Rp 5,5 juta bagi anggotanya. Dia mengatakan pemberian honor dengan nilai tersebut dasarnya jelas yakni Permendagri 44/2015 yang diubah dengan Permendagri No.51/2015.

Rudia juga mengatakan dari sisi kewajiban, pemberian honor Rp 2,5 juta sebagaimana SK terbaru dinilainya

menyimpang dari etika. Sebab dalam Pilpres sebelumnya, Panwaslu mendapatkan jatah Rp 3-3,5 juta. Rudia pun mempertanyakan kajian Pemkab Bangli sebelumnya karena dalam NPHD yang ditandatangani sudah jelas mencantumkan rincian honor bahkan telah disetujui dan sudah dibuatkan SK.

"Tiba-tiba saja SK tersebut ditarik dengan alasan keluarnya Permenkeu tersebut. Harapan kami dalam minggu ini sudah bisa kelar karena banyak tahapan penting sudah dilalui," terangnya. Sementara itu, Kabag Hukum Setda Bangli Ida Bagus Widnyana saat dihubungi terpisah belum bisa memberikan banyak keterangan. Dia mengaku akan membuat hasil konsultasi secara tertulis. (kmb40)

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015

Hal : 8



Kasus Perjalanan Dinas Dewan V Marutha Datangi Kejari

Semarapura (Bali Post) -

Kasus Perjalanan Dinas (Perdin) rombongan anggota DPRD Klungkung terus bergulir. Kali ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Marutha mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung guna mengawal kasus tersebut. Langkah tersebut dilakukan, mengingat Kejari Klungkung seakan pasif dalam mengungkap kasus yang melibatkan wakil rakyat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Marutha Putu Yudhi Pasek Kusuma menegaskan, pihaknya akan segera mendatangi Kejari Klungkung. Kedatangan mereka ini mempertanyakan sikap Kejari Klungkung yang tidak mengambil inisiatif dalam mengungkap kasus Perdin anggota dewan. Mengingat, kasus tersebut lebih dulu diusut di Kejati Bali. "Saya dengan Pak Ketua akan mendatangi kejari sementara menanyakan kenapa Klungkung tidak mengambil inisiatif dalam kasus ini," ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (23/8) kemarin.

Terkait dengan peran LSM Marutha dalam kasus ini, pihaknya menegaskan tetap akan memantau perjalanan kasus tersebut. Termasuk, melakukan pengayaan alat bukti. Pihaknya mengakui, hilangnya dua punggawa dari Kejari Klungkung, yakni Kepala Kejari Totok Bambang Sapto Dwidjo dan Kasi Intel Kejari Suhadi mempersulit pihaknya melakukan koordinasi. Meski begitu, Putu Yudhi berharap, pengganti kedua pejabat tersebut dapat melanjutkan perjuangan Kejari Klungkung dalam mengusut kasus korupsi di bumi serobotan.

Putu Yudhi mengungkapkan, dalam pengembangan kasus Perdin, pihaknya akan lebih banyak berkoordinasi dengan Kejari Klungkung. Termasuk, dalam penyerahan pengayaan barang bukti kasus Perdin. "Kami harapkan Kejari Klungkung ikut ambil andil dalam kasus ini. Akan kami bantu dengan pengayaan barang bukti di lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejati Bali telah memanggil sedikitnya 10 saksi terkait kasus Perdin Anggota DPRD Klungkung. Pemeriksaan dilakukan kepada tiga orang dari unsur DPRD Klungkung, termasuk tiga ketua komisi dan beberapa staf di Sekretariat Dewan. Setelah terkuaknya kasus yang menyeret lembaga perwakilan rakyat, muncul isu adanya unsur balas dendam dalam pengungkapan kasus perjalanan dinas ini.

Mengingat sebelumnya, Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, paling gencar menyuarakan pengungkapan kasus GOR Nusa Penida. Kasus GOR yang kini sudah masuk ke tahap penyidikan Kejari Klungkung ini, selain melibatkan dua oknum PNS, juga menyeret salah satu partai berkuasa pada saat pengadaan GOR Nusa Penida. (dwa)

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015
Hal : 10



Terkendala Pembebasan Lahan, Bendungan Lambuk Tertunda

Tabanan (Bali Post) –

Bendungan irigasi di Bendung Lambuk, perbatasan Bantas dan Megati yang rencananya akan mulai dioperasikan 2017 mending terancam tertunda. Sebab, proses pembebasan lahan sejauh ini belum sepenuhnya rampung. Bahkan, dari informasi terakhir pembangunan bendungan yang dananya berasal dari pemerintah pusat tersebut akhirnya dialihkan ke Desa Bukian, Petang Badung.

Dengan ditundanya pembangunan saluran irigasi tersebut, tentu saja dikhawatirkan akan mempengaruhi kebutuhan air lahan garapan sejumlah petani di wilayah Selemadeg Timur. Seperti diketahui, sejumlah lahan pertanian di wilayah Selemadeg Timur, khususnya di Subak Aseman masih sangat minim air yang mengalir irigasi. Akibatnya, saat memasuki musim kemarau kerap mengalami kekeringan.

"Kalau tidak salah dalam rapat terakhir, kami dengar rencana pembangunan bendungan Lambuk tertunda, karena masih terkendala pembebasan lahan. Khususnya lahan pura, dan untuk program ini dialihkan ke pemerintah pusat untuk pendanaan di Desa Bukian, Petang," beber Dirut PDAM Tabanan Ida Bagus Oka Sedana, belum lama ini. Dia mengakui, dengan tertundanya pembangunan bendungan lambuk tersebut, secara tidak langsung juga mempengaruhi sumber mata air baru untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

Dihubungi terpisah, Kepala Bappeda Tabanan IB Wiratmaja, mengakui, tidak tahu persis wacana tersebut, karena untuk proyek Bendungan Lambuk ini sifatnya berada di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Bali Penida. "Saya tidak ikuti perkembangannya, belum ada info ke saya tentang hal itu," ujar IB Wiratmaja.

Dikatakannya, pembangunan bendungan tersebut merupakan solusi penyediaan saluran irigasi bagi lahan pertanian yang berada di hilir. Pembangunan bendungan ini, kata Wiratmaja awalnya memang direncanakan mulai tahun 2015, dan diharapkan tahun 2016 sudah terealisasi. "2015 start pembebasan lahan dan sosialisasi, karena sudah masuk di rancangan *blue book* Bapenas. Sementara 2016 baru mulai pengerjaan, dananya 95 persen dari APBD sementara pemkab hanya pendampingan kecil sekitar 10 persen," bebernya.

Sementara, Kadis PU Tabanan Gusti Ngurah Anom Anthara, mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi ke Balai Wilayah Sungai Bali Penida terkait hal itu. Seperti diketahui, mengamankan ketersediaan air, khususnya untuk irigasi di Bali, Balai Wilayah Sungai Bali Penida mengajukan rencana pembangunan tujuh bendungan dan waduk baru yang tersebar di sejumlah wilayah. Bahkan, tersiar kabar, khusus Bendungan Lambuk di Kabupaten Tabanan dan dua bendungan di Kabupaten Buleleng sudah siap untuk dibangun. (kmb28)

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015
Hal : 14